



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 180 / 457 / 2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kudus, perlu menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah / Unit Kerja / Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah / Unit Kerja / Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan perencanaan, pengkoordinasian, dan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungannya; dan
 - b. menyerahkan *minute* produk hukum daerah ke Bagian Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 180 /397 / 2006 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Di Unit Penunjang Jaringan (UPJ) Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt.BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 31 Desember 2019

Nomor : 180 / 457 / 2019

PENUNJUKKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

| NO | INSTANSI | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian | |
| 2. | Inspektorat Daerah | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 3. | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 4. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 5. | Dinas Kesehatan | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 6. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 7. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 8. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 9. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 10. | Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 11. | Dinas Perdagangan | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 12. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 13. | Dinas Perhubungan | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 14. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |

| NO | INSTANSI | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 16. | Dinas Pertanian dan Pangan | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 17. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 18. | Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 19. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 20. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 21. | Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 22. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Sekretaris | |
| 23. | RSUD dr. Loekmono Hadi | Kasubag.pelayanan, informasi dan publikasi | |
| 24. | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| 25. | Bagian Pemerintahan | Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan | |
| 26. | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat | |
| 27. | Bagian Perekonomian | Kepala Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | |
| 28. | Bagian Administrasi Pembangunan | Kepala Subbagian Penyusunan Program | |
| 29. | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | |
| 30. | Bagian Umum | Kepala Subbagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | |
| 31. | Bagian Organisasi | Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana | |

| NO | INSTANSI | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|---|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32. | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kepala Subbagian Protokol | |
| 33. | Kecamatan Mejobo | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 34. | Kecamatan Dawe | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 35. | Kecamatan Kota | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 36. | Kecamatan Bae | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 37. | Kecamatan Kaliwungu | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 38. | Kecamatan Gebog | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 39. | Kecamatan Undaan | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 40. | Kecamatan Jekulo | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 41. | Kecamatan Jati | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
| 42. | Desa Gulang | Sekretaris Desa | |
| 43. | Desa Jepang | Sekretaris Desa | |
| 44. | Desa Payaman | Sekretaris Desa | |
| 45. | Desa Kirig | Sekretaris Desa | |
| 46. | Desa Temulus | Sekretaris Desa | |
| 47. | Desa Kesambi | Sekretaris Desa | |
| 48. | Desa Jojo | Sekretaris Desa | |
| 49. | Desa Hadiwarno | Sekretaris Desa | |
| 50. | Desa Mejobo | Sekretaris Desa | |
| 51. | Desa Gulantepus | Sekretaris Desa | |
| 52. | Desa Tenggeles | Sekretaris Desa | |
| 53. | Desa Samirejo | Sekretaris Desa | |
| 54. | Desa Kuwukan | Sekretaris Desa | |
| 55. | Desa Glagah Kulon | Sekretaris Desa | |
| 56. | Desa Rejosari | Sekretaris Desa | |
| 57. | Desa Kandangmas | Sekretaris Desa | |
| 58. | Desa Kajar | Sekretaris Desa | |
| 59. | Desa Margorejo | Sekretaris Desa | |
| 60. | Desa Soco | Sekretaris Desa | |
| 61. | Desa Cranggung | Sekretaris Desa | |
| 62. | Desa Ternadi | Sekretaris Desa | |
| 63. | Desa Japan | Sekretaris Desa | |

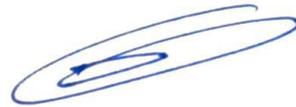
Handwritten signature/initials

| NO | INSTANSI | JABATAN | KETERANGAN |
|------|----------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 64. | Desa Colo | Sekretaris Desa | |
| 65. | Desa Lau | Sekretaris Desa | |
| 66. | Desa Piji | Sekretaris Desa | |
| 67. | Desa Dukuhwaringin | Sekretaris Desa | |
| 68. | Desa Puyoh | Sekretaris Desa | |
| 69. | Desa Tergo | Sekretaris Desa | |
| 70. | Desa Cendono | Sekretaris Desa | |
| 71. | Desa Janggalan | Sekretaris Desa | |
| 72. | Desa Demangan | Sekretaris Desa | |
| 73. | Desa Mlati Lor | Sekretaris Desa | |
| 74. | Desa Nganguk | Sekretaris Desa | |
| 75. | Desa Kramat | Sekretaris Desa | |
| 76. | Desa Demaan | Sekretaris Desa | |
| 77. | Desa Damaran | Sekretaris Desa | |
| 78. | Desa Kauman | Sekretaris Desa | |
| 79. | Desa Krandon | Sekretaris Desa | |
| 80. | Desa Singocandi | Sekretaris Desa | |
| 81. | Desa Glantengan | Sekretaris Desa | |
| 82. | Desa Barongan | Sekretaris Desa | |
| 83. | Desa Burikan | Sekretaris Desa | |
| 84. | Desa Rendeng | Sekretaris Desa | |
| 85. | Desa Kaliputu | Sekretaris Desa | |
| 86. | Desa Langgardalem | Sekretaris Desa | |
| 87. | Desa Wonosoco | Sekretaris Desa | |
| 88. | Desa Lambangan | Sekretaris Desa | |
| 89. | Desa Kalirejo | Sekretaris Desa | |
| 90. | Desa Medini | Sekretaris Desa | |
| 91. | Desa Sambung | Sekretaris Desa | |
| 92. | Desa Glagahwaru | Sekretaris Desa | |
| 93. | Desa Kutuk | Sekretaris Desa | |
| 94. | Desa Undaan Kidul | Sekretaris Desa | |
| 95. | Desa Undaan Tengah | Sekretaris Desa | |
| 96. | Desa Karangrowo | Sekretaris Desa | |
| 97. | Desa Larikrejo | Sekretaris Desa | |
| 98. | Desa Undaan Lor | Sekretaris Desa | |
| 99. | Desa Wates | Sekretaris Desa | |
| 100. | Desa Ngemplak | Sekretaris Desa | |
| 101. | Desa Terangmas | Sekretaris Desa | |
| 102. | Desa Berugenjang | Sekretaris Desa | |
| 103. | Desa Jekulo | Sekretaris Desa | |
| 104. | Desa Pladen | Sekretaris Desa | |
| 105. | Desa Sidomulyo | Sekretaris Desa | |
| 106. | Desa Sadang | Sekretaris Desa | |
| 107. | Desa Klaling | Sekretaris Desa | |
| 108. | Desa Bulungcangkring | Sekretaris Desa | |
| 109. | Desa Bulung Kulon | Sekretaris Desa | |
| 110. | Desa Terban | Sekretaris Desa | |
| 111. | Desa Gondoharum | Sekretaris Desa | |
| 112. | Desa Hadipolo | Sekretaris Desa | |
| 113. | Desa Tanjungrejo | Sekretaris Desa | |

| NO | INSTANSI | JABATAN | KETERANGAN |
|------|----------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 114. | Desa Honggosoco | Sekretaris Desa | |
| 115. | Desa Bakalankrapyak | Sekretaris Desa | |
| 116. | Desa Prambatan Kidul | Sekretaris Desa | |
| 117. | Desa Prambatan Lor | Sekretaris Desa | |
| 118. | Desa Garung Lor | Sekretaris Desa | |
| 119. | Desa Garung Kidul | Sekretaris Desa | |
| 120. | Desa Karangampel | Sekretaris Desa | |
| 121. | Desa Kedungdowo | Sekretaris Desa | |
| 122. | Desa Mijen | Sekretaris Desa | |
| 123. | Desa Setrokalangan | Sekretaris Desa | |
| 124. | Desa Gamong | Sekretaris Desa | |
| 125. | Desa Banget | Sekretaris Desa | |
| 126. | Desa Papringan | Sekretaris Desa | |
| 127. | Desa Sidorekso | Sekretaris Desa | |
| 128. | Desa Blimbing Kidul | Sekretaris Desa | |
| 129. | Desa Kaliwungu | Sekretaris Desa | |
| 130. | Desa Tanjungkarang | Sekretaris Desa | |
| 131. | Desa Jetis Kapuan | Sekretaris Desa | |
| 132. | Desa Loram Kulon | Sekretaris Desa | |
| 133. | Desa Jati Wetan | Sekretaris Desa | |
| 134. | Desa Jati Kulon | Sekretaris Desa | |
| 135. | Desa Pasuruhan Lor | Sekretaris Desa | |
| 136. | Desa Pasuruhan Kidul | Sekretaris Desa | |
| 137. | Desa Ploso | Sekretaris Desa | |
| 138. | Desa Getas Pejaten | Sekretaris Desa | |
| 139. | Desa Loram Wetan | Sekretaris Desa | |
| 140. | Desa Jepangakis | Sekretaris Desa | |
| 141. | Desa Megawon | Sekretaris Desa | |
| 142. | Desa Tumpangkrasak | Sekretaris Desa | |
| 143. | Desa Ngembal Kulon | Sekretaris Desa | |
| 144. | Desa Peganjaran | Sekretaris Desa | |
| 145. | Desa Panjang | Sekretaris Desa | |
| 146. | Desa Purworejo | Sekretaris Desa | |
| 147. | Desa Bacin | Sekretaris Desa | |
| 148. | Desa Pedawang | Sekretaris Desa | |
| 149. | Desa Dersalam | Sekretaris Desa | |
| 150. | Desa Karangbener | Sekretaris Desa | |
| 151. | Desa Ngembal Rejo | Sekretaris Desa | |
| 152. | Desa Gondangmanis | Sekretaris Desa | |
| 153. | Desa Bae | Sekretaris Desa | |
| 154. | Desa Rahtawu | Sekretaris Desa | |
| 155. | Desa Menawan | Sekretaris Desa | |
| 156. | Desa Kedungsari | Sekretaris Desa | |
| 157. | Desa Gondosari | Sekretaris Desa | |
| 158. | Desa Jurang | Sekretaris Desa | |
| 159. | Desa Besito | Sekretaris Desa | |
| 160. | Desa Karangmalang | Sekretaris Desa | |
| 161. | Desa Padurenan | Sekretaris Desa | |
| 162. | Desa Getassrabi | Sekretaris Desa | |
| 163. | Desa Klumpit | Sekretaris Desa | |

| NO | INSTANSI | JABATAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 164. | Desa Gribig | Sekretaris Desa | |
| 165. | Kelurahan Panjunan | Sekretaris Kelurahan | |
| 166. | Kelurahan Mlatinorowito | Sekretaris Kelurahan | |
| 167. | Kelurahan Kerjasan | Sekretaris Kelurahan | |
| 168. | Kelurahan Wergu Kulon | Sekretaris Kelurahan | |
| 169. | Kelurahan Wergu Wetan | Sekretaris Kelurahan | |
| 170. | Kelurahan Kajeksan | Sekretaris Kelurahan | |
| 171. | Kelurahan Mlati Kidul | Sekretaris Kelurahan | |
| 172. | Kelurahan Sunggingan | Sekretaris Kelurahan | |
| 173. | Kelurahan Purwosari | Sekretaris Kelurahan | |

Plt. BUPATI KUDUS,
WAKIL BUPATI



HARTOPO

